



# CERITA PERUBAHAN **KOMPAK** DI **JAWA TENGAH**



Sinergi yang Meningkatkan Kualitas Produk dan Pendapatan Petani Teh



Dewi Nadulang, Sang Pendongkrak Perekonomian



Asa dari PTPD untuk Desa



Tradisi Selapanan Mendukung Pelayanan Dasar yang Lebih Baik





# Sinergi yang Meningkatkan Kualitas Produk dan Pendapatan Petani Teh



Petani teh yang dibina dalam model inovasi Keperantaraan Pasar di Panimbang, Kabupaten Pekalongan.

**G**eliat perkebunan teh di Panimbang, Kabupaten Pekalongan dimulai pada 1986 melalui program Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dengan luas lahan sekitar 500 hektar. Namun, seiring berjalannya waktu, geliat itu menurun. Lantaran sejak 2012, harga teh mulai tak stabil, akibatnya pendapatan petani menyusut. Saat itu, pucuk daun teh basah hanya dihargai Rp 900 per kg. Tetapi petani tidak punya pilihan lain. Pucuk daun teh yang telah dipetik harus segera dijual agar tidak rusak dan busuk.



Dengan dukungan Program CSR dari Kyub Studio, Teh Hijau Parama Panimbang telah memiliki kemasan baru yang menasar segmen pasar kelas menengah atas dengan potensi pasar 48 juta orang.





Teh hijau yang telah kering disortir kembali sebelum dikemas, untuk memisahkan batang, daun, dan pucuk teh. ▲

Kondisi meresahkan ini mendorong petani membentuk koperasi. Pada 2014, Koperasi Paninggaran Berdikari Makmur (KPBM) berdiri. Pembentukan koperasi bertujuan untuk meningkatkan posisi tawar petani sehingga memperoleh harga yang lebih baik. Saat ini, koperasi memiliki 30 anggota aktif dari 10 desa di Kecamatan Paninggaran.

“Koperasi membeli pucuk daun teh dari petani di kisaran harga Rp 3.500 sampai 5.000 per kg yang disesuaikan dengan kondisi dan kualitas teh. Harga ini lebih tinggi dari harga yang ditawarkan perusahaan, yaitu di kisaran Rp 2.500 per kg,” tutur Rusdiyanto, Pengawas KPBM, yang juga Kepala Desa Paninggaran.

KPBM membeli pucuk daun teh basah dari petani untuk diolah sendiri menjadi teh hijau dengan nama Teh Parama. Kala itu produksi Teh Parama masih sangat terbatas karena minimnya modal, pasokan teh, peralatan produksi, dan akses pasar untuk penjualan.

Pada awal 2020, KOMPAK melalui model inovasi Keperantaraan Pasar memberikan dukungan kepada KPBM untuk memperluas akses pasar. Salah satunya dengan memfasilitasi kerja sama KPBM dengan PT Citra Kencana Cemerlang (CKC), produsen teh premium, *Havilla Tea*. Harapannya, KPBM dapat menjadi salah satu pemasok teh premium untuk PT CKC. Melalui

kerja sama ini PT CKC juga berperan meningkatkan kemampuan petani dan koperasi dalam tata kelola kebun, teknik pemetikan, pelayuan, pengeringan sampai pengemasan, sehingga menghasilkan produk berkualitas.

**Pada awal 2020, KOMPAK melalui model inovasi Keperantaraan Pasar memberikan dukungan kepada KPBM untuk memperluas akses pasar. Salah satunya dengan memfasilitasi kerja sama KPBM dengan PT Citra Kencana Cemerlang (CKC), produsen teh premium, Havilla Tea.** ■



Selain mendampingi koperasi untuk menghasilkan produk berkualitas, PT CKC juga memfasilitasi koperasi melakukan rebranding Teh Parama agar mampu memiliki pasar mandiri. Salah satunya lewat penjualan produk untuk pasar ekspor dan pasar ritel.

“Kami ingin berbagi informasi kepada koperasi tentang apa yang terjadi di bagian hilir industri teh. Selama satu tahun, kami melakukan *sharing* informasi dan pembelajaran daring. Kami bekerjasama dengan Pusat Penelitian Teh dan Kina (PPTK) Gambung untuk memberikan informasi



Sebelum proses pelayuan, daun teh disortir terlebih dahulu untuk mendapatkan daun yang baik dan berkualitas. ▲

terkait budidaya pengolahan teh yang tepat dan sesuai kebutuhan pasar. Akhirnya ketemu sebuah sinergi antara kebutuhan di hulu dan di hilir,” ujar Ajeng Respati Hapsari (33), *Sales & Marketing Director* - PT Citra Kencana Cemerlang.

Selain mendampingi koperasi untuk menghasilkan produk

berkualitas, PT CKC juga memfasilitasi koperasi melakukan *rebranding* Teh Parama agar mampu memiliki pasar mandiri. Salah satunya lewat penjualan produk untuk pasar ekspor dan pasar ritel. Setelah proses *rebranding* selesai, KPBM akan meluncurkan Teh Parama baru yang



Proses pelayuan teh paninggaran menggunakan mesin pelayuan bersuhu 70-80 derajat celsius. ▲





Pengurus KPBM, Retnowati dengan kemasan baru Teh Parama ber-tagline "PARAMA The Traveling Ted" sebagai salah satu komoditi unggulan ekspor. ▲

dilengkapi informasi tentang keunggulan dan *special flavor note* teh Paninggaran yang menjadi pembeda dari jenis teh lainnya.

**PT CKC dan KPBM mempunyai harapan yang sama, agar nantinya banyak koperasi dan kelompok tani yang menjadi produsen teh premium sehingga mampu meningkatkan pendapatan petani dan berkontribusi pada penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan** ■

"Pendampingan yang dilakukan KOMPAK dan PT CKC adalah pendampingan penuh dari hulu ke hilir. Benar-benar bisa meningkatkan kualitas teh yang diproduksi oleh koperasi sekaligus meningkatkan kapasitas dan pendapatan petani serta pemetik, mulai dari hulu di perkebunan, kemudian produksi pengolahan, menjadi produk dan pemasaran, sampai ke hilir, ke meja seduh pelanggan," terang Rusdiyanto.

PT CKC dan KPBM mempunyai harapan yang sama, agar nantinya banyak koperasi dan kelompok tani yang menjadi produsen teh premium sehingga mampu meningkatkan pendapatan petani dan berkontribusi pada penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan.



# Dewi Nadulang, Sang Pendongkrak Perekonomian



Tari Nanas Madu Pemalang menjadi ikon seni budaya di Dewi Nadulang. Sumber Foto: [dewinadulang.com](http://dewinadulang.com) ▲

**B**eberapa hari terakhir, Indah (51) warga Desa Bulakan, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, selalu datang lebih awal ke tempat ia berdagang untuk mempersiapkan lapaknya. Lapak Indah terletak di *rest area* Candi Batur, Kecamatan Belik.

Hampir dua tahun ia mengandalkan pendapatan hasil dari berdagang untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Semenjak adanya penyematan konsep desa wisata berbasis kawasan, Indah mengaku mengalami peningkatan pendapatan.

Indah tak sendiri, di *rest area* tersebut terdapat tujuh pedagang lainnya yang juga merasakan hal serupa. Ia mengaku setiap akhir pekan bisa mendapatkan Rp500 ribu sehari, dan pada hari biasa Rp200 ribu.

“Semenjak adanya konsep desa wisata berbasis kawasan yang dikenal dengan Desa Wisata Nanas Madu Pemalang (Dewi Nadulang), banyak wisatawan datang ke Kecamatan Belik,” jelasnya Rabu (04/11).





“Dewi Nadulang” adalah sebutan dari Desa Wisata Nanas Madu Pemalang. ▲  
Nanas Madu menjadi komoditi ekspor lokal dan buah khas dari Pemalang.

Menurutnya pengunjung yang datang lantaran penasaran ada apa saja di Dewi Nadulang yang ada di Kecamatan Belik.

“Sebelumnya ya sepi, adanya Dewi Nadulang membuat wisatawan penasaran untuk datang. Kami juga diuntungkan dengan banyaknya kunjungan wisatawan ke Kecamatan Belik,” ucapnya. Selain banyaknya wisatawan, Indah menerangkan perbaikan lapak para pedagang dan pembenahan fasilitas di kawasan Candi Batur juga dilakukan.

“Sebelum Agustus lalu ada pembangunan fasilitas, dan tempat berdagang kami juga ikut dibenahi. Awalnya tempat berdagang kami hanya tertutup terpal namun kini sudah layak dan permanen karena adanya Dewi Nadulang,” paparnya.

Terbentuknya Dewi Nadulang bukan hal yang tak disengaja. Konsep ini adalah hasil kolaborasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Kecamatan Belik dan Pulosari, serta KOMPAK, sebuah program kemitraan Pemerintah Indonesia dan Australia. Kolaborasi ini mengusung model Keperantaraan Pasar untuk mengembangkan desa wisata berbasis kawasan.

Sampai saat ini, Pemkab Pemalang telah menetapkan 27 desa wisata yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pemalang.

Pemkab Pemalang juga menerbitkan lima peraturan bupati (perbup) terkait Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP). Perbup ini menjadi landasan hukum untuk

memastikan keberlanjutan pengembangan wisata di kabupaten ini. RPKP ini fokus pada pembangunan kawasan wisata yang lebih terarah dan terintegrasi dengan pembangunan kawasan lainnya.

**Terbentuknya Dewi Nadulang bukan hal yang tak disengaja. Konsep ini adalah hasil kolaborasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Kecamatan Belik dan Pulosari, serta KOMPAK, sebuah program kemitraan Pemerintah Indonesia dan Australia.** ■

Pada September 2019, KOMPAK bersama Caventer Indonesia - platform edukasi dan promosi tentang pengembangan komunitas dan pariwisata berkelanjutan-melakukan kajian potensi wisata di 11 desa yang ada di Kecamatan Belik. Kegiatan ini bertujuan mendukung implementasi perbup RPKP Kabupaten Pemalang, khususnya agrowisata nanas madu di Kecamatan Belik.



Kajian tersebut, menemukan sejumlah potensi dan tantangan, seperti penerapan strategi pemasaran wisata nanas madu Pemasang agar akses pasar semakin luas, sehingga mampu menjadi ikon wisata di Kabupaten Pemasang.

Melalui model Keperantaraan Pasar, KOMPAK bersama Caverter Indonesia juga memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang pengelolaan destinasi wisata kepada pelaku pariwisata yang berada di Kabupaten Pemasang. Melalui kemitraan ini diharapkan pengembangan pariwisata di Kabupaten Pemasang bisa lebih berorientasi pasar khususnya di level nasional.

Model Keperantaraan Pasar ini kemudian diujicobakan di Kecamatan Belik (Desa Sikasur dan Bulakan) dan Kecamatan Pulosari (Desa Gunungsari dan Cikedung).

Warsito, Ketua Pokdarwis Desa Wisata Sikasur, mengakui penerapan Keperantaraan Pasar dan konsep desa wisata berbasis kawasan yaitu Dewi Nadulang sangat manjur, dan menjadi magnet wisata baik di Jawa Tengah maupun nasional.

Warsito menambahkan dunia pariwisata semakin berkembang, bahkan Desa Sikasur tengah mengembangkan sejumlah potensi alam yaitu Curug Bengkawah, edukasi pertanian, *homestay* yang

hingga kini berkembang mencapai 25 rumah, perikanan yaitu budidaya ikan koi, serta budaya melalui tarian tradisional.

**Melalui model Keperantaraan Pasar, KOMPAK bersama Caverter Indonesia juga memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang pengelolaan destinasi wisata kepada pelaku pariwisata yang berada di Kabupaten Pemasang.**

“Adanya pendampingan dari KOMPAK melalui model Keperantaraan Pasar membuat kami jadi tahu bahwa pengembangan wisata tidak hanya berpatokan pada infrastruktur namun juga pemasarannya. Atas bantuan KOMPAK pengelola wisata juga diikutkan dalam forum bisnis dengan biro-biro perjalanan wisata,” katanya.

Warsito menambahkan bahwa pendampingan KOMPAK mendorong munculnya *Destination Management Organisation* (DMO), yaitu tata kelola destinasi pariwisata yang terstruktur dan sinergis melalui pemanfaatan jejaring, informasi dan



Wisata manis dan menantang, Cubeng Rafting di Curug Bengkawah, kawasan Desa Wisata Nanas Madu Pemasang, Dewi Nadulang. Sumber foto: [dewinadulang.com](http://dewinadulang.com) ▲



Desa Wisata Mendelem adalah salah satu desa wisata utama yang ada di Desa Wisata Nanas Madu Pemalang, selain Desa Wisata Sikasur dan Desa Wisata Bulakan. Sumber foto: [dewinadulang.com](http://dewinadulang.com)

teknologi. Dukungan regulasi melalui peraturan desa pun muncul untuk memastikan keberlangsungan Desa Wisata Sikasur.

“Kolaborasi berbagai pihak ini berkontribusi pada peningkatan kunjungan wisatawan ke kawasan Dewi Nadulang. Pada Oktober 2021, tercatat sudah ada 16.000 pengunjung ke Desa Wisata Sikasur yang terintegrasi dengan Dewi Nadulang,” ucap Warsito.

Menurutnya, model Keperantaraan Pasar mampu mengubah paradigma pengelola desa wisata bahwa ekspansi pasar melalui pengembangan desa

wisata berbasis kawasan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan. “Selain itu kami juga belajar memanfaatkan teknologi yaitu dengan mengadakan *virtual tour* yang mendapat sambutan yang luar biasa dari wisatawan,” imbuhnya.

### **Wisata Virtual Pertama di Jawa Tengah**

Wisata virtual Kawasan Dewi Nadulang pertama kali digelar pada Februari 2021 lewat kanal YouTube. Inovasi ini awalnya digagas sebagai media bagi wisatawan untuk tetap dapat berkunjung ke kawasan wisata di tengah pembatasan mobilitas semasa pandemi COVID-19.

“Ya alhamdulillah adanya *virtual tour* membuat kami masih bergerak meski di tengah pandemi berkat pendampingan yang dilakukan KOMPAK juga,” kata Agus Subekti, Ketua Pokdarwis Desa Bulakan.

Awalnya menurut Agus, para pelaku wisata yang tergabung dalam Dewi Nadulang tak bisa membayangkan adanya wisata virtual dan akan dikunjungi oleh wisatawan.

“Kami juga tidak bisa membayangkan wisata virtual itu seperti apa, masak iya hanya duduk nonton laptop dan bisa berwisata. Namun setelah diedukasi oleh KOMPAK beserta Caverter Indonesia yang ahli di bidang promosi wisata kami jadi paham, bahwa wisata virtual bisa menjadi potensi dan ada segmen yang mau membayar untuk itu,” paparnya. Inovasi ini membuat masyarakat dan pengelola desa wisata tetap mampu memperoleh pemasukan.

“Dalam *virtual tour* kami bisa mendapatkan minimal Rp50 ribu untuk satu orang penonton. Jadi wisata berbasis kawasan bisa menghidupi beberapa desa apalagi lewat *virtual tour*,”





Taman Rancah, Mendelem Adventure Park, salah satu wisata alam, petualangan dan ekstrim di Dewi Nadulang Pemalang. Menjadi pelengkap atraksi seni budaya, edukasi, petik nenas madu yang dimiliki Kabupaten Pemalang. ▲

Agus. Menurutnya, konsep desa wisata berbasis kawasan memberi manfaat kepada lebih banyak masyarakat. “Karena konsep ini mempromosikan potensi wisata di satu kawasan, bukan hanya satu desa saja,” tambahnya.

### **Desa Wisata Berbasis Kawasan Motor Penggerak Perekonomian**

Sementara itu, Sigit, Kepala Desa Bulakan, Kecamatan Belik menuturkan, banyak potensi wisata yang bisa dikembangkan di wilayah selatan Kabupaten Pemalang yang awalnya belum dikelola secara maksimal.

“Adanya pendampingan membuat kami sadar bahwa potensi wisata yang ada bisa mendongkrak perekonomian

desa. Apalagi saat dicetuskan Dewi Nadulang dan banyak yang terlibat di dalamnya, kami jadi sadar harusnya desa wisata dikelola melalui konsep kawasan seperti edukasi yang ditanamkan oleh KOMPAK dan Caventer Indonesia,” ucap Sigit.

Melihat gerakan dan inovasi yang sudah berlangsung, Sigit secara terbuka menyatakan dukungannya, bahkan penganggaran melalui Dana Desa juga digelontorkan untuk mendukung terciptanya pengembangan kawasan wisata Dewi Nadulang.

“Pendanaan kami keluarkan, untuk memperbaiki sejumlah tempat wisata seperti di Candi Batur dengan anggaran Rp300 juta. Karena kami sadar adanya

Dewi Nadulang lewat peran serta desa dan sejumlah pihak bisa mendongkrak perekonomian masyarakat,” terang Sigit.

Komitmen untuk melakukan pendampingan desa wisata berbasis kawasan tersebut juga mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Sinergi itu diwujudkan untuk mendampingi lima desa wisata di wilayah Kabupaten Pemalang bagian selatan selama tiga bulan dari Maret hingga Mei 2021.

Menurut Arzia Rosyada, Kepala Bidang Promosi Disparpora Kabupaten Pemalang, pendampingan ini membuka mata pemerintah daerah terhadap kebutuhan pengembangan desa wisata.

“Meski demikian karena keterbatasan anggaran kami tidak bisa melakukan promosi secara maksimal. Namun kami beruntung karena KOMPAK bersama Caventer Indonesia memfasilitasi promosi wisata berbasis kawasan yang ada di Kabupaten Pemalang,” terangnya.

Arzia mengatakan, bersama KOMPAK, pemda melakukan *sharing* anggaran, hingga menggelar bisnis *meeting* yang mendatangkan biro wisata skala Nasional.

“Hasilnya *fun trip* dalam bentuk paket wisata ke lima desa yang masuk dalam Dewi Nadulang dilakukan. Gayung bersambut Dewi Nadulang juga mengikuti BCA Award dan memperoleh

juara tiga, hal itu membuat wisatawan penasaran dan berdatangan ke Pemalang,” paparnya.

Dalam ajang BCA Award, Arzia menerangkan satu-satunya desa wisata yang menerapkan konsep desa wisata kawasan hanya Dewi Nadulang.

“Poin plus buat Dewi Nadulang yang menerapkan desa wisata berbasis kawasan, dan bisa jadi acuan untuk daerah lain untuk menerapkan hal serupa,” kata Arzia.

Titik Widiastuti, Kepala Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Kabupaten Pemalang, juga mengakui kolaborasi KOMPAK dengan pemerintah daerah sangat

berdampak pada penataan pariwisata.

“KOMPAK membantu kami dalam hal penataan sistem, mengubah perilaku masyarakat, birokrasi sampai *software*-nya. Dan hasilnya adalah Dewi Nadulang. Ke depan konsep desa wisata berbasis kawasan juga akan kami terapkan untuk lokasi lainnya,” imbuhnya.

Titik menambahkan lewat desa wisata berbasis kawasan, roda perekonomian di Kabupaten Pemalang ikut bergerak meski di tengah kondisi sulit.

“Sebagai contoh pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang 2019-2020 di angka 5,8%. Kondisi terpukul saat pandemi pada 2020 meski minus namun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang masih tiga terbesar di Jawa Tengah,” imbuhnya. “Gagasan dari KOMPAK mengenai Keperantaraan Pasar sangat membantu kami untuk mengembangkan desa wisata dan terbukti berkontribusi mendorong perekonomian,” tutupnya.



Keindahan Curug Bengkawah menjadi salah satu pesona Dewi Nadulang yang meraih Juara 3 di ajang Desa Wisata Award 2021 dari BCA bersama Kemenparekrif. Sumber foto: [dewinadulang.com](http://dewinadulang.com)



## Asa dari PTPD untuk Desa



Sebagai aparatur kecamatan, PTPD berperan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa.

Tak seperti kantor kecamatan pada umumnya, kantor Kecamatan Belik, Kabupaten Pematang, Jawa Tengah ini punya sebuah 'Klinik'. Ini bukan 'Klinik' biasa tempat mengobati warga yang sakit. Ini adalah 'Klinik' khusus yang didedikasikan untuk membantu desa menghadapi berbagai persoalan tata kelola pemerintahannya.

"Hampir tiap hari, kami menerima perangkat desa yang datang untuk berkonsultasi. Macam-macam yang ditanyakan. Tapi kebanyakan soal bagaimana menyusun dan menyiapkan RKP Desa ataupun APB Desa," jelas Muryati, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kasi PMD) Kecamatan Belik.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa



Lebih dari 80% desa di Kecamatan Belik sudah menaikkan alokasi pelayanan pendidikan dan kesehatan berkat PTPD. ▲

Sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, peran dan fungsi kecamatan semakin dibutuhkan dalam pembinaan serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Kecamatan sebagai wilayah administratif terdekat dengan desa, sesuai fungsi tugasnya melakukan fasilitasi penyelenggaraan dan tata kelola pemerintahan desa, termasuk dalam perencanaan partisipatif desa.

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan desa bersama

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan dukungan KOMPAK, membuat model percontohan Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa atau PKAD Terpadu. Kecamatan Belik kemudian ditetapkan menjadi satu lokasi percontohan. Untuk mendukung proyek percontohan ini, serangkaian pelatihan mulai diselenggarakan bagi perangkat kecamatan yang merupakan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) di tahun 2017.

Tujuannya, untuk memperkuat tugas dan fungsi pokok kecamatan dalam membina, mengawasi serta meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam penyusunan

perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa. "Dari pelatihan-pelatihan itu, kami belajar banyak hal khususnya yang berkaitan dengan regulasi, perencanaan dan penganggaran desa," sebut Muryati yang juga bertanggung jawab sebagai PTPD ini.

Tugas pembinaan, pengawasan serta peningkatan kapasitas aparatur desa oleh kecamatan ini semakin efektif, dengan hadirnya PTPD dan Klinik Desa. Menurut Muryati, sebelum adanya peningkatan kapasitas aparatur kecamatan, 9 dari 12 desa di wilayah tersebut acapkali terlambat mengesahkan RKP



Desa dan APB Desa. Padahal kedua dokumen tersebut menjadi kunci utama bagi desa, agar dapat melayani masyarakat dengan baik.

“Ya sangat membantu kami, karena kalau ada kesalahan (saat menyusun RKP Desa maupun APB Desa) bisa berkonsultasi. Tak hanya itu, kini urusan pelaporan cukup berkoordinasi dengan kecamatan. Beda sekali sebelum ada PTPD. Kami yang notabene jauh dari pusat pemerintah harus bolak-balik ke pemda kalau ada kesalahan, itu pun tak hanya sekali bisa berkali-kali, alhasil menghabiskan waktu dan tenaga,” papar Tono Amboro Sekretaris Desa Sikasur, Kecamatan Belik.

Tak hanya Tono, dengan adanya PTPD, Gading Sinaratri juga merasakan dukungan yang sangat besar untuk kerja-kerjanya sebagai Kepala Seksi Pemerintahan di Desa Gunung Jaya. Gading, termasuk perangkat desa yang paling rajin berdiskusi dengan PTPD. Selain berkonsultasi terkait administrasi desa maupun aset desa, Gading kerap meminta bimbingan terkait penyusunan laporan pertanggungjawaban anggaran desa. “Kalau sudah

ke klinik lebih jelas. Apalagi untuk menyusun laporan anggaran. Sering juga kami berkonsultasi lewat grup *WhatsApp*,” ujarnya.

### **Dua Desa Jadi Percontohan Pendampingan PTPD**

Secara khusus KOMPAK mendampingi uji coba pelaksanaan PTPD di Desa Sikasur dan Desa Kuta, Kecamatan Belik, meski PTPD juga tetap mendampingi desa-desa lain di kecamatan ini. Selain memfasilitasi pelatihan secara klasikal, KOMPAK juga melakukan penguatan melalui metode *on-the-job training* dengan menghadirkan mentor guna mendampingi proses fasilitasi. Hasilnya, dua desa tersebut menjadi acuan dalam hal pelaksanaan

pelaporan keuangan dan peningkatan kapasitas aparatur desa di Kabupaten Pemalang.

Heru Weweg Sambodo, Camat Belik, yang juga menjadi pelaksana teknis sebagai kepanjangan tangan Bupati Pemalang untuk Tim PTPD menerangkan, harusnya tak hanya 12 desa di Kecamatan Belik, semua desa di Kabupaten Pemalang yang berjumlah 211 desa juga layak mendapat pendampingan serupa. “Untuk itu kami berharap semua desa yang belum tersentuh KOMPAK bisa mendapat pendampingan juga. Supaya tidak ada perbedaan mengenai strategi pendekatan administrasi mengenai pelaporan keuangan,” ujarnya.



PTPD juga dilibatkan dalam memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemerintahan desa. ▲

Ia mengakui pendampingan memberi banyak manfaat bagi desa agar laporan keuangan bisa satu jalur dan terarah, sesuai Peraturan Bupati yang mengharuskan semua desa menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). “Praktik baik seperti itu wajib dikembangkan dan diterapkan ke desa lain, karena hasilnya memberikan kepercayaan kepada desa yang dibimbing dan membantu desa dalam hal pertanggungjawaban ke pemerintah. Kami harap KOMPAK masih bisa bersinergi dengan pemerintah desa, kecamatan, hingga pemda,” kata Heru.

Adapun Sodik Ismanto Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Dinpermasdes) Kabupaten Pemalang menuturkan, inovasi yang dilakukan oleh KOMPAK menggugah tatanan di tingkat kabupaten. “Karena KOMPAK mendukung kami saat kami mengalami kendala baik di tingkat kabupaten hingga desa dengan menghadirkan narasumber berkompeten. Hal itu mengedukasi dan mencerahkan kami,” jelasnya.

Menurutnya rangkaian program yang disusun KOMPAK, baik regulasi hingga penguatan kapasitas aparatur desa hingga kabupaten yang sudah

berjalan, menentukan rel rencana pemerintahan ke depan. “Hal itu yang kami padukan untuk membuat tatanan pemerintahan lebih baik. Dorongan itu membuat sinergi antar lintas Organisasi Perangkat Daerah atau OPD bersama KOMPAK menghasilkan perubahan, dan menyadarkan kami mengenai permasalahan yang harus diselesaikan secara komprehensif,” katanya.

### Pelebagaan PTPD di Seluruh Kecamatan di Kabupaten Pemalang

Sejak diperkenalkan pada 2017, lebih dari 80% desa di Kecamatan Belik sudah menaikkan alokasi pelayanan dasar sebesar 8—10%, termasuk juga anggaran untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa melalui Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa (PbMAD). Desa juga semakin partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan desa.

Keberhasilan pelaksanaan percontohan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di Kecamatan Belik mendorong Pemerintah Kabupaten



Kini, aparat desa cukup meminta bimbingan PTPD terkait penyusunan laporan pertanggungjawaban anggaran desa. ▲





Penyelenggaraan pemerintahan desa kini semakin partisipatif dengan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan desa, berkat bimbingan PTPD pada perangkat desa. ▲

Pemalang melembagakan PTPD. Melalui dukungan KOMPAK yang secara intensif berkoordinasi dengan Dinpermasdes Kabupaten Pemalang, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Pemalang serta OPD terkait, pada Mei 2019 akhirnya terbit Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2019.

Peraturan Bupati tersebut kemudian menjadi landasan hukum untuk pelebagaan PTPD di seluruh kecamatan di Kabupaten Pemalang. "Persoalan desa sekarang semakin kompleks. Kita punya 211 desa disini. Ini PR bersama, bagaimana desa di kecamatan lain juga mendapat pendampingan yang maksimal," terang Bagus Sutopo, Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinpermasdes Pemalang.

Meski aturannya sudah ada, namun Bagus menilai menyelenggarakan PTPD di seluruh wilayah Pemalang bukan persoalan mudah. Selain masalah anggaran, persoalan SDM juga menjadi tantangan. "Ini yang selalu menjadi diskusi saya sama tim KOMPAK. Apa tim KOMPAK bisa juga mendamping semua kecamatan seperti di Belik? Tentu tidak. Ini yang harus kita pikirkan," pungkasnya.

**Melalui dukungan KOMPAK yang secara intensif berkoordinasi dengan Dinpermasdes Kabupaten Pemalang, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Pemalang serta OPD terkait, pada Mei 2019 akhirnya terbit Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2019.** ■

Tak lagi dipungkiri, PTPD membawa secercah harapan untuk tata kelola desa yang efektif dan lebih baik di Kabupaten Pemalang. Dengan begitu tak perlu menunggu lama bagi Pemalang mewujudkan cita-citanya untuk maju sejahtera.

# Tradisi Selapanan Mendukung Pelayanan Dasar yang Lebih Baik



Kelompok Selapanan menjadi forum alternatif untuk mendorong pelibatan perempuan dalam pembangunan di desa.

**D**i Tanah Jawa, Selapanan adalah tradisi turun temurun yang diselenggarakan untuk menyambut kehadiran bayi di usianya yang ke-35 hari. Tradisi ini dimaknai sebagai upaya untuk mencari keselamatan sekaligus wadah sosialisasi masyarakat dengan lingkungannya. Namun di Desa Cipetung, Wanatirta, dan Kedungoleng, Kecamatan Paguyangan, Brebes, Jawa Tengah, Selapanan bukan tradisi biasa.

“Kita kumpul sebulan sekali, membahas masalah-masalah yang dihadapi warga. Lalu nanti masalah itu kita sampaikan ke desa atau pihak-pihak terkait. Nanti setiap tiga bulan sekali, kami kumpul lagi dengan anggota kelompok selapanan desa lain. Untuk diskusi dan berbagi informasi,” jelas Elli Susanti (27), warga Desa Wanatirta ketika berkumpul bersama rekan-rekannya sesama anggota Selapanan.



Perubahan fungsi Selapanan di tiga desa ini terjadi sebagai respon kehadiran Dana Desa yang dikucurkan pemerintah sejak tahun 2015. Di tahun 2017, Kelompok Selapanan mendapat dampingan dari Forum Masyarakat Sipil (Formasi) dan *the Asia Foundation* (TAF) dengan dukungan KOMPAK, untuk memastikan dana tersebut benar-benar memberi manfaat bagi kemajuan desa.

Selama pendampingan KOMPAK, Kelompok Selapanan mendapat pengetahuan tentang perencanaan desa yang partisipatif dan

mendukung layanan dasar lewat pelatihan perencanaan pembangunan desa dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Mereka juga belajar melakukan penilaian partisipatif terhadap pelayanan posyandu maupun puskesmas, dan membantu pemerintah desa mengumpulkan persyaratan untuk mendapatkan identitas hukum khususnya bagi masyarakat miskin dan penyandang disabilitas. "Fokus kegiatan kami memang pada tiga layanan dasar yaitu kesehatan, pendidikan dan dokumen kependudukan," ujar Elli.

**Selama pendampingan KOMPAK, Kelompok Selapanan mendapat pengetahuan tentang perencanaan desa yang partisipatif dan mendukung layanan dasar lewat pelatihan perencanaan pembangunan desa dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).** ■

Hasilnya, sejak tahun 2018, perwakilan Kelompok Selapanan di Cipetung, Wanatirta, dan Kedungoleng dilibatkan sebagai tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang dikenal dengan sebutan Tim Sebelas (11).



Nur Khasanah, Ketua Kelompok Selapanan Desa Kedungoleng, mengunjungi salah satu warga lanjut usia, untuk menampung aspirasinya. ▲

Sebagai bagian tim penyusun RKP Desa, perwakilan Kelompok Selapanan berkontribusi mewujudkan program pemerintah desa yang responsif dan inklusif. Salah satunya adalah dengan memastikan penjangkauan layanan adminduk yang lebih luas.

Selama kurun 2018-2020, Kelompok Selapanan membantu lebih dari 500 anak usia 0-18 tahun mendapatkan akta kelahiran mereka. "Alhamdulillah, sekarang saya bisa mengurus akta kelahiran anak saya dengan mudah, cepat dan tanpa biaya," ujar Darniah (27), warga Desa Cipetung.



Darniah, warga Desa Cibeung mendapatkan akta kelahiran dengan bantuan Kelompok Selapanan. ▲



Kelompok perempuan mengadakan pertemuan Selapanan setiap bulan di tingkat desa. ▲

Nunung Widyastuti, Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes berharap, keberadaan Selapanan terus dipertahankan untuk menjangkau masyarakat miskin yang tinggal di pelosok mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan. "Kelompok Selapanan membantu kami meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran, karena kami tidak punya petugas yang berada di desa untuk menjangkau masyarakat," ujar Nunung.

Di masa pandemi COVID-19, Kelompok Selapanan tetap melakukan pendataan dan pengurusan dokumen kependudukan seperti Kartu Identitas Anak (KIA) dengan mengikuti

protokol kesehatan. "Kami juga terlibat dalam upaya penanggulangan COVID-19, melalui anggota kami yang bergabung dengan Satgas COVID di desa mereka," pungkas Yatno (41), salah satu anggota Selapanan dari Desa Cipetung.



# Jurus Jitu Kabupaten Pekalongan Tekan Kemiskinan



Inovasi Laboratorium Kemiskinan dan pemanfaatan aplikasi SEPAKAT berkontribusi meningkatkan penghasilan para perajin gula aren Desa Botosari, Kecamatan Panningaran, Kabupaten Pekalongan

Sejak 2018, Kabupaten Pekalongan menggagas inovasi Laboratorium Kemiskinan yang menitikberatkan penanggulangan kemiskinan berbasis data. Inovasi ini dijalankan dengan memanfaatkan aplikasi SEPAKAT (Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi, dan Analisis Kemiskinan Terpadu) yang dikembangkan Bappenas, KOMPAK, dan Bank Dunia. Data acuan yang akurat terbukti jitu dalam memaksimalkan upaya pengentasan kemiskinan. Tahun 2020, Kabupaten Pekalongan pun dianugerahi penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).



Para perajin aren mendapat pelatihan supaya mampu mengolah aren menjadi gula semut beraneka rasa. Hingga mereka memiliki merek sendiri, yaitu Gula Aren Semut, Nethes. Sumber foto: [minumsehatbugar.com](http://minumsehatbugar.com)

Bermukim satu kilometer dari bibir pantai, banjir rob selalu menjadi mimpi buruk Timbul Trijaya (43) dan keluarganya. Rumah sederhana mereka di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, tergenang air dengan ketinggian sekitar 50 sentimeter. Jika ketinggian air mencapai lebih dari satu meter, Timbul dan warga lainnya terpaksa mengungsi ke lokasi yang disediakan pihak desa dan kecamatan. Air baru surut satu minggu, bahkan satu bulan kemudian.

Keterbatasan finansial memaksa Timbul dan keluarganya bertahan tinggal di rumah mereka selama hampir dua dekade.

Sehari-hari, Timbul mencari nafkah sebagai perangkat desa dengan upah minim. Istrinya, Sarofah, bekerja sebagai penjahit harian lepas. Selain kebutuhan pokok sehari-hari, mereka harus menanggung biaya pendidikan ketiga anaknya yang duduk di bangku TK, SD, dan SMA.

Suatu hari, tim peneliti dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) mendatangi kediaman Timbul untuk mendata rumah-rumah target rehabilitasi.

Pendataan ini dilakukan sebagai implementasi dari inovasi Laboratorium Kemiskinan dan aplikasi SEPAKAT untuk membantu

Pekab Pekalongan menentukan prioritas penerima bantuan sosial.

Dua bulan kemudian, keluarga Timbul menerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan. "Setelah mendapat bantuan RTLH, rumah kami tidak kebanjiran lagi, tidak bocor, makin teduh, udara bersirkulasi, bahkan sekarang punya Mandi, Cuci, Kakus (MCK) sendiri sehingga baik bagi kesehatan kami sekeluarga," tutur Timbul.

Inovasi Laboratorium Kemiskinan dan pemanfaatan aplikasi SEPAKAT juga berkontribusi meningkatkan penghasilan para perajin gula aren Desa Botosari, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan.

Inisiatornya, Diyono (39), merupakan perajin gula aren sekaligus pengurus Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perajin Gula Aren Lestari (Pagar). Diyono dan istrinya sudah cukup lama prihatin dengan kesejahteraan para perajin aren yang tak kunjung pulih.



Salah satu rumah warga Botosari, yang menerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berkat pemanfaatan aplikasi SEPAKAT dan Laboratorium Kemiskinan. ▲



Minat generasi muda untuk nderes atau mengambil nira aren berangsur surut. Pekerjaan ini dianggap tidak menjanjikan masa depan.

Hasil pendataan Laboratorium Kemiskinan dan aplikasi SEPAKAT terhadap permasalahan Diyono dan para perajin aren mendorong Pemkab Pekalongan memediasi Diyono untuk mengikuti Stasiun Lapang Agro Kreatif (SLAK), program kerjasama Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop) dengan Institut Pertanian Bogor (IPB). Diyono dan para perajin aren mendapat pelatihan supaya mampu mengolah aren menjadi gula kristal atau gula semut beraneka rasa.

“Kami juga diajari cara mengemas yang baik hingga punya merek sendiri yaitu Gula Aren Semut Nethes. Pemkab memfasilitasi pengurusan Izin Produk Industri Rumah Tangga dan sertifikat halal MUI. Cara memasarkannya kami pelajari lewat seminar-seminar yang diselenggarakan oleh Dinas Perindagkop Jawa Tengah. Hasilnya, konsumen bisa membeli langsung produk-



Terdapat lebih dari 500 pohon aren di Dusun Gunung Surat yang sebagiannya dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan gula aren. Kurang lebih 20 keluarga disana menjadi pengrajin gula aren di Gunung Surat. ▲

produk kami di toko ritel, termasuk minimarket dan toko *online*. Harga jual produk aren kami pun terdongkrak dari Rp14.000 menjadi Rp20.000 per kilogram,” terang Diyono.

Inovasi Laboratorium Kemiskinan digagas Pemkab Pekalongan sejak 2018. Tujuan utamanya adalah menekan angka kemiskinan dan dampak-dampak yang ditimbulkannya, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar dan permukiman. Melalui inovasi ini, Pemkab mengumpulkan data dari desa-desa miskin sebagai modal awal untuk memetakan potensi kolaborasi antar pemangku kepentingan. Data-data inilah yang kemudian menjadi titik tolak untuk menggali potensi-potensi ekonomi kemasyarakatan –seperti halnya KUB Pagar

dengan potensi gula arennya.

Pada tahap awal, Laboratorium Kemiskinan berlangsung di tiga desa yakni Botosari, Kertijaya, dan Mulyorejo. Untuk mempermudah proses pengumpulan dan analisis data serta penentuan intervensi yang akurat, Laboratorium Kemiskinan memanfaatkan aplikasi SEPAKAT (Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi, dan Analisis Kemiskinan Terpadu) yang dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama KOMPAK dan Bank Dunia.

Pengembangan SEPAKAT bermula dari keinginan Bappenas pada 2016 untuk menggabungkan beberapa aplikasi yang mendukung program penanggulangan

kemiskinan yaitu *Pro-Poor Planning Budgeting and Monitoring (P3BM)* dan Sistem Informasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Terpadu (SIMPADU). Pada 2017, Bank Dunia juga mengembangkan *Sub National Poverty Assessment (SNAPA)* yang telah diuji coba di Provinsi DKI Jakarta dan Kota Bogor.

Bersama KOMPAK dan Bank Dunia, Bappenas merumuskan modul-modul aplikasi yang kemudian diberi nama SEPAKAT. Aplikasi SEPAKAT terdiri dari fitur-fitur yang membantu Pemerintah Daerah membuat perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor*). Aplikasi ini menyediakan perangkat analisis untuk mengolah data-data kemiskinan per sektor sekaligus mengevaluasi masalah-masalah kemiskinan secara terpadu dan akurat.

SEPAKAT tetap memberi ruang pada Pemerintah Daerah (pemda) untuk menentukan pilihan intervensi solusi sesuai karakter dan kebutuhan daerahnya. Aplikasi ini dirancang mampu beradaptasi dengan regulasi yang menjadi acuan bagi provinsi/



Bersama KOMPAK dan Bank Dunia, Bappenas merumuskan modul-modul aplikasi yang kemudian diberi nama SEPAKAT yang menjadi platform penganalisa kemiskinan di suatu kabupaten hingga ke tingkat mikro. ▲

kabupaten/kota dalam perencanaan pembangunan sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang "Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah".

Pembenahan basis data dan analisis cepat yang ditawarkan aplikasi SEPAKAT diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi pembangunan daerah. Dengan demikian, pemda dapat mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan.

KOMPAK berperan menyediakan tenaga ahli untuk memberi masukan teknis terkait pengembangan aplikasi serta melatih tim Bappenas yang akan menyelenggarakan

kegiatan pelatihan aplikasi SEPAKAT. Sejak SEPAKAT diluncurkan pada Mei 2018, Bappenas telah melatih 185 kabupaten/kota dan 11 provinsi. KOMPAK juga turut mendampingi dan memantau pemanfaatan aplikasi SEPAKAT dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran di sejumlah kabupaten.

"KOMPAK memberikan pelatihan aplikasi SEPAKAT untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Aplikasi ini sangat membantu kami menemukan dan menentukan prioritas masalah, sekaligus mencari solusi pengentasan kemiskinan yang cocok untuk daerah kami," terang Didin Nasruddin (45), Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda Litbang, Kabupaten Pekalongan.



Setelah menguasai cara penggunaan aplikasi, Didin segera memanfaatkannya untuk menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD). Aplikasi berbasis data ini juga diakui Didin mempermudah pekerjaannya menentukan lokasi, sasaran, dan intervensi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan. Hasilnya, Bappeda tak kesulitan menemukan dan menolong warga yang benar-benar membutuhkan seperti Timbul dan keluarganya di Desa Mulyorejo, juga para perajin gula aren di Desa Botosari.

Berjalan lebih dari dua setengah tahun, sejumlah inovasi yang dilahirkan Laboratorium Kemiskinan mampu menekan angka kemiskinan di tiga desa sasaran. Rumah tangga miskin di ketiga desa tersebut berkurang dari 1.425 menjadi 1.120 rumah tangga. Laboratorium Kemiskinan juga berhasil mengurangi jumlah rumah tidak layak huni dari 348 menjadi 86 rumah.

Inovasi Laboratorium Kemiskinan pun mengantar

Kabupaten Pekalongan memenangkan penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada 2020. Kementerian PANRB menilai inovasi ini menunjukkan keseriusan Pemkab Pekalongan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sepanjang tahun 2021, Pemkab Pekalongan memperluas inovasi Laboratorium Kemiskinan hingga menjangkau delapan desa. Selain Mulyorejo dan Botosari, desa-desa yang dijangkau antara lain Windurojo (Kecamatan Kesesi), Gembong (Kecamatan Kandangserang), Pedawang (Kecamatan Karanganyar), Kertijayan (Kecamatan Buaran), Jeruksari (Kecamatan Tirto), dan Kedungwuni (Kecamatan Kedungwuni). Desa-desa ini menjadi sasaran setelah mempertimbangkan tingginya kasus stunting dan anak tidak sekolah yang muncul dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Wujud inovasi Laboratorium Kemiskinan yang dijalankan di desa-desa tersebut

meliputi program pelatihan kerja dan pemberian alat bantu kerja, pembenahan RTLH, jambanisasi, penyediaan air bersih, penanganan anak tidak sekolah, dan penanganan individu dengan disabilitas.

**Inovasi Laboratorium Kemiskinan pun mengantar Kabupaten Pekalongan memenangkan penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada 2020. ■**

“Pelatihan kerja dan pemberian alat bantu kerja tidak hanya untuk UMKM tapi juga individu yang masih produktif namun berpenghasilan rendah. Terkait penanganan anak tidak sekolah, intervensi yang dilakukan termasuk program sekolah gratis serta pemberian seragam, sepatu, dan alat tulis. Bagi penyandang disabilitas, intervensi yang dilakukan meliputi pemberian kursi roda, alat bantu dengar, juga bantuan pelatihan kerja sesuai jenis disabilitasnya,” papar Didin Nasruddin.

# PAUD HI Wujudkan Pendidikan Menyeluruh Sejak Dini



Di Kabupaten Pemalang, pelaksanaan program PAUD-HI masih memprioritaskan kepada anak berusia 3-6 tahun.

**K**eceriaan nampak pada wajah Muhammad Ferdinan Alhabi (5), bocah asal Desa Sikasur, Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Sembari didampingi sang ibu, Anisa Fitri Utami (25) dan ayahnya Januar (28), Muhammad sibuk belajar di ruang tamu rumahnya. Ibunya secara telaten memberi arahan kepada Muhammad mengenai materi dasar yang ia pelajari di sekolahnya.

Muhammad memang seperti anak sebayanya, namun ia nampak sedikit berbeda dalam hal berkomunikasi dengan ibunya. Jika kebanyakan anak hanya mengikuti kemauan orang tua ataupun selalu berkehendak semaunya, Muhammad justru kerap mengajukan pertanyaan kritis terlebih dahulu pada ibunya jika ingin melakukan sesuatu.



Anisa pun demikian. Dalam memutuskan sesuatu, ia selalu mengikutsertakan Muhammad baik dalam memilih barang ataupun saat menghadapi permasalahan ketika menemani anaknya mengerjakan tugas. Komunikasi tersebut terjalin lantaran sekolah tempat Muhammad menuntut ilmu di TK ABA 2 Sikasur menerapkan model pembelajaran holistik. Model pembelajaran holistik tidak hanya mendorong anak untuk berkembang sesuai dengan usia, tetapi juga menanamkan nilai-nilai

karakter yang diharapkan bisa membentuk sikap/ tingkah laku peserta didiknya dalam kehidupan sehari-hari.

Dari sana, Anisa dan Muhammad belajar dan mendapat layanan secara menyeluruh (holistik) yang mencakup layanan pendidikan, gizi dan kesehatan, serta pengasuhan dan perlindungan guna mengoptimalkan semua aspek perkembangan dan pertumbuhan anak. Anisa merasakan sendiri, pembiasaan-pembiasaan holistik yang ditanamkan di sekolah anaknya, membuat

ia paham akan pentingnya mendampingi anaknya secara menyeluruh untuk memenuhi hak anak.

“Sebelumnya saya hanya tau kalau sekolah ya belajar dan belajar. Namun saat tempat sekolah anak saya menerapkan PAUD HI, saya sedikit tahu kalau pemenuhan hak anak tidak hanya belajar membaca tapi banyak aspek di dalamnya, dan itu penting untuk masa depan anak,” kata Anisa.

Anisa juga menceritakan, bagaimana penerapan PAUD HI mengubah pola asuh orang tua ke anak.



Upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan anak usia dini telah dilakukan oleh pemerintah dengan adanya ▲  
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013.



Posyandu secara rutin mengunjungi lembaga PAUD untuk melakukan pemeriksaan kesehatan anak-anak berusia 2-4 tahun di PAUD tersebut. ▲

“Saya jadi melek, bahwa pendidikan dasar tidak hanya pendidikan seperti era dulu, namun harus terintegrasikan segala aspek dan nilai-nilai seperti moral, etis, religius, psikologis, filosofis, dan sosial untuk memenuhi kebutuhan esensial anak,” jelasnya.

Ini yang mendasari Anisa untuk selalu melibatkan anak dalam berbagai hal termasuk tidak memaksakan kehendaknya terhadap sang anak. Dengan begitu Anisa berharap, anak semata wayangnya ini bisa tumbuh menjadi anak yang cerdas dan memiliki kepribadian yang baik.

Adapun TK ABA 2 Sikasur tempat Muhammad menempuh ilmu merupakan satu di antara enam wilayah uji coba untuk pengaplikasian model PAUD HI di Kabupaten Pemalang. Penerapan model PAUD HI

dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan sebelumnya terkait dengan perbaikan tata kelola pada layanan dasar termasuk sektor pendidikan. Tujuannya, agar anak usia 3 hingga 6 tahun bisa mengakses layanan pendidikan yang berkualitas.

Penetapan uji coba penerapan model PAUD HI yang merupakan rangkaian dari tahapan penguatan dukungan multi pihak untuk PAUD di desa, diinisiasi oleh Bappeda dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang bersama KOMPAK di tahun 2019. Sebagai langkah awal, KOMPAK melakukan *pemetaan* dan menggali permasalahan pendidikan termasuk PAUD yang lokasinya di desa. Proses ini dilakukan dengan mengamati kesenjangan daerah dalam meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan dukungan teknis

dalam tata kelola layanan PAUD yang masih perlu ditingkatkan di Kabupaten Pemalang. Berdasarkan perencanaan strategis dan arah kebijakan Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan, ditemukan APK PAUD di Kabupaten Pemalang masih relatif tergolong rendah sekitar 56,68%. Sedangkan jumlah PAUD yang sesuai standar baru mencapai 55% dari 834 PAUD (2018). Masalah lainnya juga ditemukan bahwa belum adanya koordinasi dan integrasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan penanganan PAUD, cenderung masih berjalan sendiri-sendiri, dan setiap sektor fokus pada tugas pokok dan fungsi masing-masing saja. Selain itu, dukungan anggaran baik dari tingkat kabupaten dan desa masih belum maksimal karena prioritas pembangunan untuk PAUD belum optimal.

Kemitraan yang dilakukan KOMPAK bersama Pemkab Pemalang, juga mencetuskan beberapa regulasi seperti Peraturan Bupati No 64 tahun 2019 tentang PAUD HI dan Surat Keputusan Bupati



No. 422 tahun 2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas PAUD HI. Menurut Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Pemalang, Indra Sulistiyono, pendampingan ini membantu pemda untuk meningkatkan mutu layanan satuan PAUD HI. "Berkat pendampingan KOMPAK, sisi regulasi menjadi diperkuat yang akhirnya mendorong peran lintas sektor untuk memperbaiki kualitas layanan dan lembaga PAUD HI," katanya.

Dituturkan Indra, berkat pendampingan tersebut kini pemda mengalokasikan anggaran melalui APBD, serta memberikan bimbingan teknis pelatihan kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan satuan dalam mengimplementasikan pembelajaran yang diselenggarakan satuan PAUD sesuai kebijakan yang telah ditetapkan.

"Beberapa OPD yang terintegrasi untuk menyukseskan pelaksanaan PAUD HI menganggarkan pendanaan untuk sejumlah kegiatan, seperti Dinsos terkait perlindungan anak, Dinkes untuk memantau

tumbuh kembang anak, hingga Disdukcapil untuk memberikan layanan kependudukan terhadap anak untuk mendapatkan Akta Kelahiran maupun Kartu Identitas Anak (KIA). Dindik pun menyelenggarakan program peningkatan kapasitas penyelenggaraan PAUD HI. Banyak aspek yang diberikan baik motorik, agama, moral, serta seni, dan kami memastikan aspek tersebut sudah terpenuhi pada layanan PAUD," ucapnya.

Berkat kolaborasi antar OPD untuk mendukung PAUD HI, beberapa waktu lalu Kabupaten Pemalang menerima anugerah Kabupaten Layak Anak

untuk tingkat madya. Adapun salah satu indikator penganugerahan ini adalah dengan adanya penyelenggaraan PAUD HI.

### **Rencana Aksi Daerah (RAD) PAUD HI Kabupaten Pemalang**

Berdasarkan data Dindik Kabupaten Pemalang, APK PAUD di Kabupaten Pemalang pada tahun 2020 sebesar 75%, meningkat bila dibandingkan pencapaian tahun 2017 yang hanya 68% lebih. Capaian ini merupakan dampak dari upaya penyelenggaraan lintas sektor melalui Gugus Tugas PAUD HI yang diselenggarakan oleh Pemkab Pemalang.



Penyelenggaraan PAUD merupakan upaya perwujudan SDGs yang menargetkan APK PAUD mencapai 100% pada tahun 2030. ▲

Selain memfasilitasi penetapan Peraturan Bupati dan pembentukan Gugus Tugas PAUD HI, pendampingan KOMPAK kepada Pemkab Pemalang juga mendorong disusunnya Rencana Aksi Daerah (RAD) PAUD HI di Kabupaten Pemalang 2020-2024 sebagai dasar pelaksanaan PAUD HI.

Kasubid Pendidikan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat (PMM) Bappeda Kabupaten Pemalang, Dwi Puji Astuti menyebutkan dalam RAD PAUD HI tercantum mekanisme koordinasi, pelaksanaan, dan monitoring intersektoral untuk mendukung PAUD HI. Target kerja lintas sektor tersebut dituangkan dalam rencana kerja Gugus Tugas PAUD HI yang terintegrasi dan dapat ditemukan pada satuan PAUD melalui uji coba layanan PAUD HI hingga adanya enam wilayah uji coba PAUD HI yang ada di Kecamatan Belik yaitu KB Arroyan di Desa Gombong, KB Al Ikhlas di Desa Badak, TK ABA 2 di Desa Sikasur, TK Qurrota Ayyun di Desa Beluk, RA Muslimat Salafiyah di Desa Bulakan, dan TK Pertiwi di Desa Gunung Jaya, dengan rata-rata kehadiran dari 50 peserta didik.

“Melalui sinergi yang kami bangun bersama KOMPAK, kami berhasil menerapkan penyelenggaraan PAUD HI yang lebih baik. Serta didukung dengan adanya alokasi anggaran untuk pelaksanaan, hingga tercetus RAD PAUD HI dimana semua OPD berkewajiban mengawal pelaksanaan PAUD HI,” terangnya.

Menurut Dwi, selain memastikan indikator capaian setiap anggota gugus tugas PAUD HI yang diatur didalam RAD tercapai, dukungan KOMPAK juga mendorong OPD untuk mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan PAUD HI. Misalnya Dinas Pendidikan telah menganggarkan sekitar 4

miliar rupiah, dan Dinkes yang mencapai ratusan juta untuk mendukung kegiatan-kegiatan pada satuan PAUD agar menerapkan pendekatan holistik dalam pembelajarannya. “Disdukcapil juga mendukung untuk memenuhi kebutuhan anak mengenai administrasi kependudukan. Bahkan berkat program PAUD HI, inovasi jempot bola agar anak-anak mendapatkan akta juga tercetuskan,” ucapnya.

Dwi menambahkan, melalui program tersebut pemahaman orang tua mengenai kebutuhan dasar anak, pentingnya kesehatan dan tumbuh kembang anak juga meningkat.



Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif demi terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. ▲



## Pemenuhan Prinsip Tumbuh Kembang Anak

Satu di antara OPD yang ikut bergerak untuk menyukseskan penerapan PAUD HI adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang yang merupakan anggota Gugus Tugas PAUD HI. Mereka mengadakan peningkatan kapasitas terkait kegiatan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK), bukan hanya untuk tenaga kesehatan tetapi juga untuk tenaga pendidik pada satuan PAUD. Dinkes juga melakukan kerjasama dengan Puskesmas yang dapat menjangkau layanan di satuan PAUD agar dapat memberikan edukasi mengenai kesehatan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan anak dalam hal pelayanan kesehatan dan pemantauan tumbuh kembang.

Susi Kusumawati, Analis Gizi Bidang Kesmas, Dinkes Kabupaten Pemalang menjelaskan, dengan edukasi tersebut harapannya para tenaga pendidik dengan pendampingan dari tenaga kesehatan bisa mendeteksi tumbuh

kembang anak didik. “Misalnya ada gangguan tumbuh kembang, mereka bisa menilai status gizi melalui tabel yang sudah dituangkan pada Peraturan Menteri Kesehatan No 2 Tahun 2020 Tentang Standar Antropometri Anak, serta informasi di buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak),” paparnya.

Selain pelaksanaan kegiatan SDIDTK, Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga meningkatkan pemahaman tentang empat prinsip hak anak kepada para tenaga pendidik PAUD yaitu non diskriminasi, mementingkan kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup atau kelangsungan hidup dan perkembangan anak serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Susi sangat berharap dukungan kegiatan dari lintas sektor melalui anggota Gugus Tugas PAUD HI pada satuan PAUD di Kabupaten Pemalang dapat berlanjut dan merata, karena penerapan metode



Lokasi layanan PAUD-HI diupayakan dekat dengan tempat tinggal masyarakat dan terjangkau dari aspek biaya. ▲

PAUD HI yang didukung berbagai pihak akan berpengaruh pada masa depan anak. “Hal ini jelas berbeda dengan metode PAUD era dahulu yang hanya menganggap anak sekedar anak tanpa ada keterlibatan dan pemahaman yang diajarkan melalui edukasi,” tambahnya.



**KOMPAK**  
Jalan Diponegoro No. 72  
Jakarta 10320 Indonesia  
T: +62 21 8067 5000  
E: [communication@kompak.or.id](mailto:communication@kompak.or.id)  
[www.kompak.or.id](http://www.kompak.or.id)